

**Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di Kota Padang (Studi
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



OLEH :

DAHLIANI PUTRI

2020 / 20043076

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT
PENYERAPAN ANGGARAN DI KOTA PADANG (STUDI PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI KOTA PADANG)**

Nama : Dahliani Putri
Nim / TM : 20043076 / 2020
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

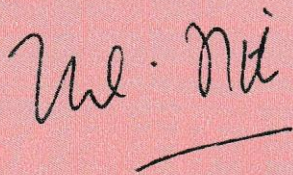
Padang, 21 Januari 2025

Disetujui Oleh:

Mengetahui

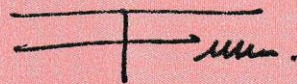
Kepala Departemen Akuntansi

Pembimbing



Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak

NIP: 19740706199903 2 002



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, CA

NIP: 19730213199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Diajukan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di Kota Padang (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Nama : Dahliani Putri

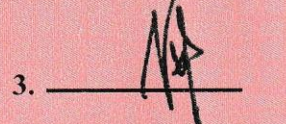
Nim / TM : 20043076 / 2020

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 21 Januari 2025

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, CA	1. 
2	Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3	Anggota	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dahliani Putri
NIM/Thn Masuk : 20043076/2020
Tempat /Tgl Lahir : Padang/ 01 April 2002
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Komp. Puri Suma Kencana Blok A/5, Pasir Putih,
Tabing, Padang.
No. Hp : 082170136180
Judul Skripsi : Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Tingkat
Penyerapan Anggaran di Kota Padang (Studi Pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,




Dahliani Putri

NIM. 20043076

ABSTRAK

Putri, Dahliani. (20043076/2020). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran di Kota Padang (*Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang*).

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi untuk mengetahui bagaimana regulasi keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data utama dikumpulkan dengan survei melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada 52 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Padang sebagai populasi penelitian ini. Mengambil 3 responden pada tiap-tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hingga menjadikan sampel penelitian sebanyak 156 sampel. Penelitian ini menggunakan Teori *Stakeholder*. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh variabel yang diteliti. Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel regulasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Padang. Dengan hasil signifikansi untuk variabel regulasi keuangan daerah sebesar 0,000 dan untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0.041 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.

Kata Kunci : Regulasi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pelaksanaan Anggaran, Penyerapan Anggaran

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Sri Kartini Handayani, S.E dan Bapak Kamrizal Eka Dharma, S.H serta kakak penulis, Excha Alvionita, S.H. Terima kasih atas doa, motivasi dan semua cinta kasih yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nelvirita, S.E., M.Si., Ak selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran dari penulisan skripsi ini.
5. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Vita Fitria Sari, S.E., M.Si selaku dosen penelaah peneliti yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

6. Aisyah Riani Mirza, Ayu Astuti Cania, dan Agnes Wal Aidil selaku sahabat tercinta penulis yang selalu ada dan bersedia membantu dan menyemangati penulis dalam situasi dan kondisi apapun.
7. Fajrul Ikhsan Rilano, S.Tr, Par, selaku orang yang meluangkan waktu dan tenaga, menenangkan dan meyakinkan penulis bahwa mampu melewati fase skripsi ini.
8. Responden penelitian yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini dan menerima dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Padang, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Penelitian yang Relevan.....	20
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Pengembangan Hipotesis.....	30
BAB III	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data	35

D. Uji Instrumen Data	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Metode Analisis Data	41
G. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	43
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Analisis Deskriptif	46
C. Uji Kualitas Data	54
D. Uji Asumsi Klasik.....	56
E. Analisis Regresi Berganda	60
F. Pengujian Hipotesis	61
G. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian	68
C. Keterbatasan	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran Pagu, Realisasi Anggaran dan Presentasinya.....	4
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Tabel Populasi Penelitian	33
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Penelitian	46
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Usia	47
Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan.....	48
Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	48
Tabel 4. 6 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja	49
Tabel 4. 7 Data Responden Berdasarkan Jabatan.....	49
Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4. 9 Klasifikasi TCR.....	51
Tabel 4. 10 TCR Variabel Penyerapan Anggaran.....	51
Tabel 4. 11 TCR Variabel Regulasi Keuangan	52
Tabel 4. 12 TCR Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	53
Tabel 4. 13 Uji Validitas Variabel Y	54
Tabel 4. 14 Uji Validitas Variabel X.....	55
Tabel 4. 15 Uji Reabilitas	55
Tabel 4. 16 Uji Normalitas	56
Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4. 18 Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4. 19 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	60

Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Daterminasi	61
Tabel 4. 21 Hasil Uji Statistik F	62
Tabel 4. 22 Uji Parsial T.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4. 1 P-Plot Uji Normalitas	57
Gambar 4. 2 Scatterplot – Uji Heterokedastisitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	77
Lampiran 2. Nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang	81
Lampiran 3. Tabulasi Data Penelitian	85
Lampiran 4. Tabel Uji Validitas	93
Lampiran 5. Uji Signifikansi Parsial T (t-test).....	94
Lampiran 6. Tanda Terima	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan prinsip otonomi, pemerintah daerah yang berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD) memiliki kemandirian untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri.

Penerapan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan mereka sendiri dengan melalui sistem yang terintegrasi yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rahmawati & Ishak, 2020). Menurut Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan diawasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang ditetapkan setiap tahun.

APBD yang berjalan dengan efektif dan efisien dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang jika didukung dengan adanya penyerapan anggaran yang baik. Terserapnya anggaran dengan baik maka akan dapat mewujudkan tujuan-tujuan dalam mensejahterakan masyarakat daerah. (Sanjaya, 2018).

Penyerapan anggaran merupakan pencapaian dari alokasian anggaran dalam suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu, yang dipandang dari realisasi anggaran dalam bentuk kegiatan, proyek, atau pengeluaran (Halim, 2014). Dalam organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, pencairan atau realisasi anggaran tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama periode waktu tertentu.

Tercapainya realisasi kegiatan yang telah direncanakan merupakan cerminan dari penyerapan anggaran yang baik. Serapan anggaran yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target kinerja. Rendahnya penyerapan anggaran dianggap sebagai tanda kegagalan yang dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Erlina et al., 2017). Tingkat penyerapan anggaran harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagaimana termasuk pada indikator kinerja keuangan mereka (BPKP, 2011).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran termasuk sebagai aspek pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran yang mengevaluasi bagaimana anggaran direalisasikan, termasuk efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi dalam pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan urusan daerah dibantu oleh unsur perangkat daerah yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disampaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang mana dalam SKPD terdapat beberapa unit yang masing-masing unit melaksanakan satu atau sejumlah program kerja.

Pemerintah dalam tugasnya yang dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah masih mendapati masalah dalam pengelolaan keuangan yang didasari karena tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah. Komite Pemantauan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa penyerapan anggaran daerah yang rendah masih menjadi masalah umum dalam pengelolaan APBD yang terjadi secara berulang setiap tahunnya.

Pola penyerapan anggaran pada pemerintah sering menunjukkan pola “*year end rush*” yang mana proses penyerapan anggaran yang lambat terjadi pada awal tahun dan menumpuk atau bertambah pesat di akhir tahun. Kebiasaan ini dinyatakan tidak baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak efektif (Noviwijaya, 2013).

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020, efektif ditentukan dari pencapaian hasil dari kegiatan atau program dengan target yang telah ditetapkan, yang mana dilihat dengan membandingkan keluaran dengan hasilnya. Efektivitas dari pemerintah daerah dikatakan apabila tujuan dari pemerintah daerah tersebut telah tercapai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Meskipun pemerintah masih belum memiliki standar yang pasti dalam menentukan kategori kurangnya penyerapan anggaran yang masuk. Beberapa daerah memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh satuan kerja yang menyatakan bahwa pemerintah akan tercatat mengalami keminiman

atau kurangnya serapan anggaran jika mereka tidak dapat memenuhi 90% dari anggaran yang dialokasikan sampai akhir tahun (Alimuddin, 2018).

Dilansir dari antaranews.com, penyerapan anggaran yang buruk akan berdampak negatif pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Contohnya program pemerintah yang berkaitan dengan program pengurangan kemiskinan masyarakat, yang apabila mengalami keterlambatan dan penumpukan pembayaran di akhir tahun akan membuat manajemen kas pemerintah daerah menjadi kurang baik dan menjadikan program ini tidak berjalan dengan baik.

Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami tingkat penyerapan anggaran yang kurang optimal. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada di Kota Padang;

Tabel 1. 1 Anggaran Pagu, Realisasi Anggaran dan Presentasinya

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2021	2.626,63 M	2.222,27 M	84,61
2.	2022	2.642,66 M	2.249,63 M	85,13
3.	2023	2.569,85 M	2.310,51 M	89,91

Sumber : (Djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang rendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 84,61%. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga sebesar 85,13%. Penyerapan anggaran yang tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 89.91%.

Dilansir dari djpk.kemenkeu.go.id menyatakan target tingkat penyerapan anggaran adalah 20% untuk triwulan I, 40% untuk triwulan II, 60% pada semester 1 (triwulan III) dan 90% pada semester 2 (triwulan IV).

Dalam Laporan Realisasi APBD Kota Padang pada Badan Pendapatan Daerah tanggal 30 September tahun 2022 mendapati penyerapan anggaran sebesar 42,32% pada triwulan III. Ini harus di tingkatkan karena persentase ini terbilang rendah yang mana dalam tiga bulan lagi adalah akhir tahun. Dengan masih adanya pajak yang belum tercapai yakni Pajak Penerangan Jalan sebesar 31,94% yang harus dicapai dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan realisasi Rp 63,1 M dengan capaian sebesar Rp 341 M.

Berdasarkan djpk.kemenkeu.go.id, data triwulan I tahun 2023 Kota Padang 14,23% yang terbilang kurang baik dengan capaian kurang dari target yang ditentukan. Pada triwulan II dengan presentase 31,90%, triwulan III sebesar 51,10%, dan triwulan IV 70,94%. Dengan pada masing-masing triwulan masih kurang dari target minimal penyerapan.

Meskipun dengan besarnya penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Padang, hal ini perlu adanya upaya yang maksimal dalam seluruh kegiatan dan kepada seluruh perangkat daerah agar selalu bersama dan menjalin kerjasama yang terukur dan terstruktur serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah serta kesejahteraannya.

Pada simetris.padang.go.id juga terdapat capaian perjanjian kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD Kota Padang yang mana dari beberapa sasaran capaian tersebut banyak yang mencapai target secara keseluruhan pada triwulan IV. Yang mana diartikan demi menyiasati pelaksanaan anggaran agar dapat terealisasi, para satuan kerja melakukan percepatan realisasi anggaran meskipun

terlaksananya pada akhir tahun hanya untuk mencapai target dalam pelaksanaan anggarannya.

Penyerapan anggaran rendah di awal tahun bisa disebabkan oleh anggaran yang hanya diperuntukkan pada kegiatan operasional rutin seperti pembayaran gaji pegawai, pembelanjaan barang dan jasa, dan pembelanjaan pemeliharaan. Sedangkan, penyerapan anggaran yang melonjak pada triwulan keempat disebabkan oleh pihak SKPD berusaha mempercepat realisasi anggaran terhadap perintah-perintah yang telah diajukan oleh pemerintah daerah (Setiawan et al., 2023).

Kurangnya pencapaian target penyerapan anggaran dapat menyebabkan kehilangan manfaat belanja karena dana yang dialokasikan tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga adanya dana yang menganggur (*idle money*) yang menjadikan kurang efektifnya pelaksanaan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat (Setiawan et al., 2023).

Sama halnya dengan penyerapan anggaran yang ditemukan oleh Susilawati (2016) di Jawa Tengah, yang mana terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV. Beberapa penelitian yang dilakukan menemukan penyebab dari rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah dikarenakan kurang baiknya kualitas pelaksanaan penganggaran yang ada di pemerintah kota tersebut (Sitaresmi & Wahyudi, 2022; Suardani et al., 2023; Susilawati et al., 2016).

Tahapan dari pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dimulai dari APBD yang disahkan melalui peraturan atau regulasi daerah. Regulasi berperan untuk memberikan pedoman untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Regulasi atau peraturan keuangan adalah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahmawati & Ishak, 2020).

Regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran pada pemerintah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Regulasi keuangan daerah merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur proses pengelolaan keuangan di daerah. (Erliyani & Sulastiningsih, 2023). Pada intinya regulasi merupakan alat untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Namun semakin banyak kebijakan yang ada dan berubah secara cepat menjadikan pelaksanaan anggaran mengalami kendala dan dapat menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran yang terjadi di instansi pemerintah.

Perubahan regulasi dapat mengganggu penyerapan anggaran jika tidak diikuti dengan penyesuaian yang tepat. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan

anggaran dilihat dari bagaimana pemahamannya dan kepatuhan setiap pegawai daerah terhadap peraturan yang ada.

Apabila adanya regulasi yang jelas, maka dapat mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran (Ramadhani & Setiawan, 2019). Dalam pembuatan atau penyajian laporan keuangan yang berkualitas akan lebih mudah jika pelaksanaan dan peraturan pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD lebih lengkap dan dapat diakses.

Juliani & Sholihin (2014) menemukan bahwa organisasi atau lembaga pemerintah mencapai tingkat penyerapan anggaran yang baik dikarenakan pegawai atau pengguna anggarannya memahami peraturan yang berlaku. Dengan maksud regulasi yang tidak jelas dan berubah-ubah akan menjadi hambatan untuk pengguna anggaran atau pegawai yang juga akan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan menghambat target penyerapan anggaran.

Dalam proses pelaksanaan penganggaran maupun program untuk mengetahui apakah berjalan sesuai dengan yang telah diatur, maka perlu adanya sistem yang dapat mengawasi semua kegiatan atau program yang dilakukan yakni melalui sistem pengendalian internal pemerintah. Suatu sistem yang dinyatakan dapat memengaruhi penyerapan anggaran dengan cara memastikan anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai aturan (Kennedy et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan anggaran, menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah

yang menjadikan adanya pengendalian yang dapat meminimalkan hambatan teknis, pelanggaran prosedur atau terjadinya pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal pemerintah dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada dana penumpukan pada akhir tahun dan dana untuk kepentingan pribadi (Aldina, 2016). Yang mana pada dasarnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga risiko penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Sanjaya, 2018) yang menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan sumber daya manusia yang diduga memiliki dampak pada penyerapan anggaran. Namun, analisis faktor pengadaan barang dan jasa, serta pengaruh sumber daya manusia (SDM), memerlukan analisis kinerja yang berbeda dari analisis faktor lainnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pengaruhnya terhadap anggaran pemerintah.

Dengan begitu pemahaman hubungan dan dampak masing-masing faktor yang dapat mempengaruhi pada penelitian ini sangat diharapkan memberikan rekomendasi secara komprehensif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran pada SKPD di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apakah regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang ada di SKPD Kota Padang?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang ada di SKPD Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh regulasi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran di SKPD Pemerintah Kota Padang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penyerapan anggaran di SKPD Pemerintah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang mengoptimalkan proses dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah. Yang bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai sumbang saran dalam mencapai tingkatan penyerapan anggaran, serta bagi akademik untuk dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi pengetahuan di bidang sektor publik khususnya upaya yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk melihat secara empiris pengaruh Regulasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD pemerintah di Kota Padang. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Padang.
2. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Padang.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat maupun kontribusi secara keilmuan baik tataran teoritis maupun praktis.

1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait penyerapan anggaran. Hasil penelitian mendukung teori *stakeholder* yang dengan mengutamakan kepentingan bersama selaku pihak yang berkepentingan, apabila adanya dukungan dari pemahaman pengguna anggaran terkait regulasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada sistem pengendalian internal maka dapat meningkatkan penyerapan anggaran yang terjadi pada pemerintah daerah Kota Padang.

2. Pada tataran praktek, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap regulasi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah diharapkan dapat menjadi perhatian para pelaku penganggaran di setiap instansi publik untuk mendukung tercapainya pelaksanaan good corporate governance.

C. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian mendatang. Dari penelitian yang dilakukan beberapa keterbatasan penelitian yang mana sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen regulasi dan sistem pengendalian yang diharapkan peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel dependen penyerapan anggaran mungkin bisa memasukkan variabel tambahan seperti faktor perencanaan, sumber daya manusia, waktu penetapan anggaran, dan pemilihan responden yang lebih baik. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan kebijakan untuk daerah yang lebih besar, seperti kabupaten atau kota di seluruh provinsi.
2. Penggunaan instrumen kuesioner yang terdiri atas pertanyaan tertutup tidak memberikan ruang bagi responden untuk memberi pendapat di luar pertanyaan yang telah diajukan sehingga peneliti dihadapkan pada keterbatasan penjelasan atas hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui penyebaran kuesioner/angket juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, W., Adam, B., Puspita, I., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2023). Segmentasi Satuan Kerja Dalam Rangka Akselerasi Penyerapan Anggaran Dan Mendorong Ekonomi Regional. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 73–93. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.487>
- Aldina, I. (2016). *PENGARUH KUALITAS DIPLOMA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang)*. June.
- Alimuddin. (2018). *NALISIS PENYERAPAN ANGGARAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN KOPERTIS MAKASSAR*. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin*.
- Apriliani, Herawati, Wahyuni. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KEPERIBADIAN CONSCIENTIOUSNESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Survei pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 7(1).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik ;Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Deliana. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran dengan Penyusunan Anggaran sebagai Variabel intervening (Studi Kasus SKPD Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*. *Thesis*.

- Erlina, Saputra, A., & Muda, I. (2017). The analysis of the influencing factors of budget absorption. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 287–300.
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *Darden Business School, working pa*, 1–32.
<https://doi.org/10.1002/jctb.619>
- Ghozali. (2018). *BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian*. 82–96.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Handayani, C. H. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan Silpa Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi XX, September*, 1–119.
- Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177–199.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10>
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117.
<https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652>
- Kuncoro, D. E. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi

- Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov.
Kaltim.Kalimantan Timur: Administrasi Bisnis. *Ejournal Administrasi Bisnis; Universitas Mulawarman*.
- Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>
- Ningtyas, W. P. M. (2020). PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang). *Skripsi*.
- Noviwijaya, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender Dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 91–100.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710–726.

<https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>

Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v1i1.i01.p01>

Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Akuntansi*, 2(4), 2–9.

Setiawan, H., Yusra, M., Usman, A., & Arliansyah, A. (2023). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(3), 425.

<https://doi.org/10.29103/jam.v1i3.9874>

Shenny, A. (2012). Hubungan Penyusunan Anggaran Belanja Modal Dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Modal. Studi pada Pemerintah Kabupate/Kota Wilayah IV Priangan Jawa Barat. *Universitas Pendidikan Indonesia*.

Sitairesmi, S., & Wahyudi, H. (2022). *Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung (The Influence of SiLPA and PAD on Budget Absorption in Lampung Province)*. 2(1), 29–44.

Stephen, G. dada. (2017). *INTERNAL CONTROL SYSTEM AND BUDGET*

*PERFORMANCE IN LOCAL GOVERNMENTS, A CASE OF KOBOKO
DISTRICT LOCAL GOVERNMENT. 11(1), 92–105.*

- Suardani, A. A. P., Anomyasa, I. B., Wijana, I. M., & Astawa, I. K. (2023). *The Influence of Budget Planning And Human Resources on Budget Absorption at The Bali State Polytechnic* (Vol. 2023). Atlantis Press SARL.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-202-6_6
- Sudaryono, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan mix method.*
- Sudasri, D. (2016). *PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). 4(August), 30–59.*
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 1–71.
- Sulaeman, A. S., Hamzah, A. P., & Priyanto, R. (2012). Penyerapan Anggaran Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal BPPK, 4*, 20–37.
- Susilawati, Saepudin, A., Kushendar, D. H., Nurfadhillah, A., Wijayanto, A., Suprajang, S. E., Auliana, W., Amin, M., Anwar, S. A., Salamah, S., & Ratag, Wieske Anneleen Kumenaung, Anderson G. Engka, D. S. M. (2016). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provindi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 3(3)*, 14–29.

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj%0Ahttp://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8059>

Syahputra, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Universitas Sumatera Utara. Medan*.

Yulnaezar Pramudya. (2021). ANALISIS SERAPAN ANGGARAN PADA INSTANSI BADAN LAYANAN UMUM. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.

<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>